

Diplomasi Kesehatan Global Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 Dalam Forum Multilateral: Studi Komparatif G20 dan World Health Organization

Isha Balqis^{1*}, Muhammad Dipo Alam¹, Aninda Wulan Rohmawari¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : ishabalqis66@gmail.com

Article History:

Received : 21-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords: Diplomasi

Kesehatan Global; WHO; G-20;

Pasca Pandemi

ABSTRAK

Diplomasi kesehatan global menjadi semakin krusial pasca pandemi COVID-19 seiring terungkapnya kerentanan sistem kesehatan lintas batas, ketimpangan akses vaksin, serta lemahnya solidaritas global dalam respons awal pandemi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran diplomasi kesehatan global Indonesia dalam forum multilateral G20 dan World Health Organization (WHO) pasca pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus komparatif, yang berfokus pada proses diplomasi, aktor yang terlibat, serta hasil yang dicapai Indonesia di kedua forum tersebut. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi G20, WHO, World Health Assembly (WHA), International Health Regulations (IHR), serta sumber kebijakan dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 2022 dan partisipasi aktifnya di WHO untuk mendorong penguatan arsitektur kesehatan global, peningkatan akses vaksin yang lebih adil, serta harmonisasi protokol kesehatan bagi negara berkembang. Di G20, Indonesia menjalankan diplomasi yang bersifat presidensial dan cepat melalui agenda ketahanan sistem kesehatan, pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF), serta kerja sama transfer teknologi vaksin. Sementara itu, diplomasi Indonesia di WHO berlangsung melalui mekanisme negosiasi yang lebih normatif dan mengikat, tercermin dalam pengesahan Pandemic Agreement dengan 35 pasal serta revisi International Health Regulations. Kombinasi peran Indonesia di kedua forum tersebut berimplikasi pada pemenuhan kepentingan nasional melalui penguatan kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan produksi farmasi lokal, dan sistem surveilans kesehatan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai *bridge-builder* antara negara maju dan berkembang serta aktor penting dalam agenda dekolonisasi kesehatan global pasca pandemi.

PENDAHULUAN

Diplomasi kesehatan global menjadi krusial pasca pandemi COVID-19 karena pandemi tersebut mengekspos kerentanan sistem kesehatan dunia terhadap ancaman lintas batas. Pandemi memicu ketimpangan akses vaksin dan sumber daya medis, sehingga mendorong negara-negara untuk memperkuat kerjasama multilateral guna mencegah krisis serupa di masa depan. Dalam tata kelola kesehatan global, diplomasi ini memastikan koordinasi internasional yang inklusif. Pandemi COVID-19 menyoroti kegagalan respons global awal, seperti kurangnya solidaritas dalam distribusi vaksin, yang memicu perlunya diplomasi untuk mengatasi ketimpangan akses kesehatan. Diplomasi kesehatan memfasilitasi pertukaran informasi, teknologi medis, dan sumber daya secara cepat melalui forum seperti WHO. Hal ini

juga membangun ketahanan dengan melibatkan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat sipil.

Diplomasi kesehatan memperkuat global health governance melalui prinsip multilateralisme, kepemimpinan politik, dan lintas sektor untuk menangani pandemi secara kolektif. Ia menjembatani hambatan diplomatik negosiasi kebijakan WHO. Indonesia, misalnya memainkan peran sebagai bridge-builder untuk negara berkembang dalam advokasi akses vaksin yang adil (Rahmawan, 2022). Indonesia mewakili negara-negara berkembang dan kepentingan ASEAN di G-20, berperan sebagai jembatan antara ekonomi maju dan berkembang. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia mendorong pertumbuhan inklusif di tengah tantangan global seperti pemulihan ekonomi dan ketegangan politik (Yulius P Hermawan, 2011).

Pada presidensi G-20 2022 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, Indonesia menyelenggarakan KTT Bali, mengelola perpecahan akibat konflik Rusia-Ukraina untuk menjaga kesatuan G-20 dan mengamankan komitmen proyek senilai USD 71,5 M. Hasil utama mencakup Deklarasi Bali tentang pemulihan ekonomi serta terobosan di bidang kesehatan dan iklim. Pasca COVID-19, Indonesia memperkuat kesiapsiagaan pandemi melalui kolaborasi WHO, memperbarui rencana kesiapsiagaan pandemi Influenza Nasional dan memperluas situs pengawasan. Indonesia mengalokasikan USD 30 juta via G-20 untuk mendanai kegiatan WHO, mendukung akses vaksin merata dan reformasi arsitektur kesehatan global (Saepudin, 2024).

Indonesia memainkan peran strategis di forum multilateral seperti G-20 dan WHO, namun kajian komparatif keduanya memang masih minim di literatur akademis (Qudus, 2025). Indonesia menonjol saat menjabat presidensi G-20 pada 2022, memimpin agenda prioritas seperti arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi digital. Sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator, Indonesia menjembatani negara maju dan berkembang, mendorong inisiatif seperti Global expenditure Support Fund dan kolaborasi untuk krisis pangan serta energi (Rinzani Sri Wandini, 2024). Indonesia aktif di WHO melalui partisipasi dalam respons pandemi COVID-19, advokasi akses vaksin equitabel via COVAX, dan kontribusi pada regulasi kesehatan internasional seperti IHR (International Health Regulations). Namun, peran ini lebih reaktif dibandingkan G-20 yang proaktif dalam kepemimpinan, dengan fokus pada isu kesehatan spesifik daripada ekonomi makro luas. Diplomasi Indonesia di G-20 menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan negara berkembang dengan kekuatan besar, termasuk tekanan Barat pada konflik Rusia-Ukraina dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana Indonesia memanfaatkan presidensi untuk memperkuat citra bebas aktif sambil mendorong inklusivitas forum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif sebagai desain utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial terkait diplomasi kesehatan global Indonesia pada forum multilateral, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui angka atau data kuantitatif semata. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 7), penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif karena fokus utamanya adalah pada

pengumpulan data dalam bentuk narasi, kata-kata, ungkapan, dan deskripsi mendalam yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi.

Dalam konteks ini, peneliti tidak mengutamakan pengukuran secara statistik atau penghitungan numerik, melainkan berusaha menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara menyeluruh. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses interpretatif yang mendalam dan disusun dalam bentuk deskriptif naratif, agar dapat disampaikan kepada pembaca dengan jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan diplomasi kesehatan global dalam forum multilateral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Posisi Indonesia di G-20 dan WHO

Indonesia memegang posisi penting sebagai anggota pendiri G-20 sejak 1999 dan aktif berperan di WHO sebagai negara berkembang utama. Perannya menekankan ketahanan ekonomi, arsitektur kesehatan global, serta menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang. Kontribusi ini menunjukkan pengaruh strategis Indonesia di forum multilateral.

Indonesia bergabung dengan G20 pada 1999 berkat ketahanan ekonominya saat krisis, populasi besar, dan kepemimpinan di ASEAN. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia memprioritaskan pertumbuhan inklusif, ketahanan bencana, dan transisi energi yang adil, seperti pada presidensi G-20 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger” yang fokus pada sistem kesehatan, transformasi digital, dan energi berkelanjutan. Pada presidensi G20 Afrika Selatan 2025, Indonesia mendorong pertumbuhan global yang setara dan keberlanjutan utang di KTT Johannesburg, menjembatani kepentingan negara berkembang (Sushanti, 2019).

Pada presidensi G20 2022, Indonesia memimpin diskusi kesehatan komprehensif, memperkuat arsitektur kesehatan global pasca COVID melalui kelompok kerja persiapan pandemi dan akses vaksin yang adil. Indonesia terus terlibat di trek kesehatan seperti rantai pasok tangguh dan cakupan kesehatan universal, sejalan dengan prioritas G20 terkini seperti AI di kesehatan dan sistem tangguh iklim.

Indonesia aktif dalam perumusan kebijakan WHO, berkontribusi pada Pandemic Agreement dan revisi International Health Regulations sebagai suara negara berkembang. Negara ini telah menyelenggarakan sidang WHO dan mendukung program seperti pemberantasan polio serta cakupan kesehatan universal melalui JKN, sambil terlibat dalam inisiatif keamanan kesehatan global. Keterlibatan terkini mencakup advokasi akses setara terhadap countermeasures medis dalam kerangka darurat WHO.

Bentuk Diplomasi Kesehatan Indonesia di G-20

Indonesia menjalankan diplomasi kesehatan di G20 terutama melalui presidensi G-20 2022, dengan fokus memperkuat arsitektur kesehatan global pasca-pandemi. Agenda utamanya mencakup ketahanan sistem kesehatan, harmonisasi standar protokol, dan redistribusi manufaktur serta pengetahuan vaksin. Diplomasi ini menghasilkan komitmen konkret seperti Bali Leaders’ Declaration yang mendukung akses vaksin merata dan kesiapsiagaan pandemi.

Indonesia mengusung tiga sub-agenda prioritas: membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan internasional, serta pengembangan

pusat manufaktur dan pengetahuan untuk pencegahan pandemi. Isu spesifik termasuk penanggulangan tuberkulosis, One Health, resistensi antimikroba, vaksinasi merata, dan penguatan surveilans serta SDM kesehatan. Pendanaan dan akses obat-alat kesehatan juga ditekankan untuk negara berkembang.

Instrumen utama meliputi pertemuan Health Working Group (HWG) dan tingkat menteri kesehatan di Yogyakarta, serta side event seperti pada TB dan One Health. Deklarasi seperti Bali Leaders' Declaration diadopsi di KTT Bali, ditambah inisiatif pendanaan bersama WHO dan kerja sama teknis harmonisasi aplikasi seperti Peduli Lindungi dengan negara lain. Aksi bilateral di pinggir KTT mencakup kunjungan Dirjen WHO dan pilot project standar protokol dengan 30+ negara. Bagi Indonesia, hasilnya termasuk peningkatan kapasitas JKN, produksi vaksin lokal, dan integrasi sistem digital kesehatan regional. Secara global, tercipta komitmen investasi vaksin TB, AI diagnosis, surveilans real-time, serta penguatan mekanisme seperti Pandemic Fund dan IHR revisions. Kerja sama vaksin dengan Afrika Selatan, Brazil, dan India memperluas akses, sementara legacy HWG mendukung tata kelola kesehatan yang lebih inklusif.

Bentuk Diplomasi Kesehatan Indonesia di WHO

Indonesia menjalankan diplomasi kesehatan di WHO melalui partisipasi aktif dalam sidang *World Health Assembly* (WHA) dan komite terkait, dengan fokus memperjuangkan akses berkeadilan bagi negara berkembang. Diplomasi ini menghasilkan pengaruh nyata terhadap kebijakan nasional seperti penguatan JKN dan produksi vaksin lokal, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis global (Deasy Silvy Sari, 2024). Indonesia terlibat dalam WHA 78(2025) yang mengesahkan Pandemic Agreement, serta negosiasi *International Health Regulations* (IHR) dan Pandemic Treaty, termasuk memimpin kelompok pembahasan IHR. Delegasi Indonesia melibatkan pakar nasional dan konsultan publik, dengan apresiasi Dirjen WHO Tedros atas kontribusi aktifnya di forum seperti COVAX untuk distribusi vaksin. Partisipasi juga mencakup komite pembiayaan kesehatan global dan produksi lokal melalui GAVI (Candra, 2023).

Indonesia mendorong akses setara vaksin, obat, dan diagnostik (VTD) bagi negara berkembang, termasuk transfer teknologi dan diversifikasi produksi untuk cegah ketergantungan. Agenda utama meliputi penguatan kesiapsiagaan pandemi via Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pembiayaan kesehatan inklusif, serta dukungan One Health and imunisasi anak. Diplomasi ini menekankan kedaulatan nasional dalam pencegahan dan respons pandemi. Hasil konkret termasuk adopsi Pandemic Agreement dengan 35 pasal yang merefleksikan kepentingan Indonesia, seperti penguatan SDM kesehatan dan R&D, serta 510 juta dosis vaksin booster via diplomasi global.

Analisis Komparatif G-20 dan WHO

Indonesia memainkan peran diplomasi kesehatan di G20 dan WHO dengan proses, aktor serta hasil yang saling melengkapi, meski berbeda dalam skala dan fokus. Persamaan utama terletak pada agenda ketahanan kesehatan global pasca-pandemi, sementara perbedaan mencakup aktor negara vs lembaga khusus dan hasil deklarasi ekonomi vs perjanjian hukum. Kombinasi ini memperkuat kepentingan nasional seperti produksi vaksin lokal dan citra Indonesia sebagai pemimpin negara berkembang (Saepudin, 2024).

Kedua forum melibatkan proses negosiasi multilateral dengan pertemuan tingkat menteri dan puncak kepala negara, di mana Indonesia aktif sebagai delegasi utama bersama

pakar Kemenkes. Persamaan hasil mencakup penguatan arsitektur kesehatan seperti harmonisasi protokol, surveilans patogen, dan akses vaksin merata untuk negara berkembang. Aktor non-negara seperti WHO dan industri farmasi juga terlibat di keduanya, mendukung transfer teknologi.

Proses G20 lebih cepat dan presidensial (misalnya HWG di Yogyakarta 2022), sementara WHO melalui WHA tahunan dan komite hukum seperti IHR/Pandemic Agreement dengan konsultasi publik panjang. Aktor G20 didominasi 19 negara besar plus UE, sedangkan WHO melibatkan 194 negara anggota dan badan teknis (kesehatan spesifik). Hasil G20 berupa deklarasi non-binding seperti Bali Leaders' Declaration dan FIF, berbeda dengan instrumen binding WHO seperti Pandemic Agreement 35 pasal.

Peran ganda ini menghasilkan 8 MoU bilateral G20 (transfer vaksin Mrna, hibah TBC) yang terintegrasi dengan WHO's COVAX, meningkatkan produksi Biofarma dan JKN nasional. Kepentingan kesehatan nasional terpenuhi via kemandirian farmasi dan 510 juta dosis booster, didukung pendanaan FIF dari G20. Kombinasi peran menjadikan Indonesia "jembatan" negara maju-berkembang, sukses diplomasi pasca-COVID via G-20 presidency dan kepemimpinan WHA 78. Citra sebagai aktor inklusif terlihat dari kerja sama Selatan-Selatan (Afrika, ASEAN) (Saepudin, 2024).

KESIMPULAN

Indonesia berhasil memanfaatkan presidensi G20 2022 dan partisipasi aktif di WHO untuk mendorong agenda ketahanan kesehatan global, akses vaksin merata, dan harmonisasi protokol bagi negara berkembang. Persamaan kedua forum terletak pada penguatan arsitektur kesehatan pasca-COVID, sementara perbedaan mencakup proses presidensial cepat G20 versus negosiasi binding WHO, dengan hasil konkret seperti FIF, Pandemic Agreement 35 pasal, dan transfer teknologi mRNA. Kontribusi kombinasi ini memenuhi kepentingan nasional melalui peningkatan kapasitas JKN, produksi lokal, serta surveilans, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dekolonisasi kesehatan global dan jembatan antar negara maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arani, N. Z. (2022, April 26). Presidensi G20 Jadi Komitmen Indonesia Perkuat Sistem Kesehatan Global. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6051458/presidensi-g20-jadi-komitmen-indonesia-perkuat-sistem-kesehatan-global>
- [2] Candra, I. A., & Nurkhalisa, S. (2023). Before and after COVID-19 outbreak: Indonesia as a successful story of WHO global health diplomacy. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 7(1), 30–47. <https://doi.org/10.22146/ikat.v7i1.99836>
- [3] Diskominfo. (2022, juli 29). Posisi Indonesia di G20. Retrieved from diskominfo.bandungkab.go.id: <https://diskominfo.bandungkab.go.id/artikel/43313-posisi-indonesia-di-g20>
- [4] Fisipol. (2020, April 17). Covid-19 dan Krisis Tata Kelola Kesehatan Global. Retrieved from fisipol.ugm.ac.id: <https://fisipol.ugm.ac.id/covid-19-dan-krisis-tata-kelola-kesehatan-global/>
- [5] Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H., & Tanaga, S. (2011). *G-20 research project: The role of Indonesia in the G-20: Background, role and objectives of*

- Indonesia's membership*. Jakarta, Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung, Indonesia Office; Bandung, Indonesia: Universitas Katolik Parahyangan.
- [6] Limanseto, H. (2025, November 26). Indonesia tegaskan Posisi Strategis di G20, Hadirkan Pertumbuhan Global yang Inklusif dan Ketangguhan Ekonomi Tangguh. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6683/indonesia-tegaskan-posisi-strategis-di-g20-hadirkan-pertumbuhan-global-yang-inklusif-dan-ketangguhan-ekonomi-tangguh>
- [7] Quddus, M. S. (2025). Analisis konvergensi hukum ekonomi internasional: Tantangan hukum bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dan ASEAN. *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(1), 62–88. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.264>
- [8] Rahmawan, M. F., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Indonesia terhadap COVAX Facility mengenai ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(2), 159–167. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i2.865>
- [9] Saepudin, S., Haryati, V. W., Revidy, A. R., & Audrei, F. (2024). The role of Indonesia's G20 Presidency in shaping global health architecture after the Covid-19 pandemic. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 5(2), 162–186. <https://doi.org/10.51413/jisea.Vol5.Iss2.2024.162-186>
- [10] Sari, D. S., Halimah, M., Akim, A., Maximillian, R., Muawal, F. S., & Lie, N. J. (2024). Strategic health diplomacy: An Indonesia's approach in securing COVID-19 booster vaccine supplies. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 17–30. <https://doi.org/10.18196/jhi.v13i1.17829>
- [11] Sushanti, S. (2019). Aktualisasi Indonesia dalam G20: Peluang atau tren? *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p01>
- [12] Tarmizi, S. N. (2022, Oktober 27). Lima capaian Indonesia dalam Presidensi G20. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved from <https://kemkes.go.id/id/lima-capaian-indonesia-dalam-presidensi-g20>
- [13] Wandini, R. S., Salsabila, L. I., Rohman, F. N., Febriyanti, D., & Fujilestari, N. A. (2024). Peran Indonesia di forum Kerjasama G20: Mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 143–150.
- [14] Widyawati, M. (2020, september 22). Atasi Pandemi COVID-19 Perlu Kemampuan Diplomasi Global. Retrieved from Kemkes.go.id: <https://kemkes.go.id/id/atasi-pandemi-covid-19-perlu-kemampuan-diplomasi-global>
- [15] Wondal, J. F. (2025, juni 18). Diplomasi Kesehatan Global. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/jessicafeodoronawondal8205/68526470ed641518705c3332/diplomasi-kesehatan-global>